
ANALISIS FUNGSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MPU SINDOK PADA ABAD KE-10 M

Hari Fitria Utama

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Malang
hari.fitria.1907316@students.um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas kebijakan masa pemerintahan Mpu Sindok dengan pendekatan analisis fungsional Robert King Merton. Masalah yang dibahas adalah fungsi Mpu Sindok sebagai raja pada struktur pemerintahan kerajaan yang dipimpinnya. Masalah ini dijawab dengan mengetahui fungsi manifes, fungsi laten, dan aspek *disfungsional* dari Mpu Sindok berdasarkan kebijakannya. Metode yang digunakan yakni metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan membandingkan kebijakan Mpu Sindok dengan konsep *astabrata*, dapat diketahui Mpu Sindok melaksanakan fungsi manifes pada bidang pembangunan infrastruktur, sedangkan fungsi laten pada bidang sosial. Aspek *disfungsional* Mpu Sindok masih samar untuk ditentukan terutama di bidang raja sebagai simbol kejayaan karena kurangnya informasi dalam prasastinya. Kebaruan penelitian ini adalah belum idealnya Mpu Sindok sebagai raja tanah Jawa berdasarkan *astabrata*.

Kata kunci: *analisis fungsional; kebijakan; Mpu Sindok*

FUNCTIONAL ANALYSIS OF MPU SINDOK'S GOVERNMENT POLICY IN THE 10TH CENTURY AD

Abstract

*This research discusses the policies during Mpu Sindok using Robert King Merton's functional analysis approach. The problem discussed is how Mpu Sindok could function as king in the government structure of the kingdom he led. This problem is answered by knowing the manifest functions, latent functions and dysfunctional aspects of Mpu Sindok based on his policies. The method used is the historical method which consists of four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. Based on the research that has been done by comparing Mpu Sindok's policies with the *astabrata* concept, it can be seen that Mpu Sindok carried out manifest functions in the field of infrastructure development while latent in the social area. The dysfunctional aspect of Mpu Sindok is still vague, especially in the king as a symbol of glory due to the lack of information in his inscriptions. This research's novelty lies in the fact that Mpu Sindok is not yet Ideal as the king of Java based on *astabrata* because he has not fulfilled some aspects that a king should fulfill.*

Keywords: *functional analysis; Mpu Sindok; policy;*

Naskah masuk: 15-01-2023; Revisi akhir: 4-05-2023; Disetujui terbit: 15-05-2023

I. PENDAHULUAN

Perpindahan ibu kota pada sebuah kerajaan kerap kali terjadi pada kerajaan besar. Hal tersebut dilakukan guna menghindari adanya serangan musuh ataupun mendapatkan daerah kekuasaan yang lebih luas. Kerajaan yang pernah memindahkan ibu kotanya ialah Kerajaan Mataram Kuno yang semula ibu kotanya di daerah Jawa bagian tengah menuju Jawa bagian timur pada abad ke-10. Perpindahan pusat pemerintahan tersebut menandai adanya perubahan signifikan dalam sejarah Mataram Kuno. Naik takhtanya Raja Sindok menjadi penanda untuk era baru yakni selama sekitar 300 tahun Jawa dipimpin oleh dinasti yang baru, yaitu wangsa Isana. Nama tersebut berasal dari gelar resmi Sindok yakni Mpu Sindok Sri Isanatunggadewawijaya (Widiah, 2018).

Pada saat pemerintahan kerajaan Mataram Kuno masih berada di Jawa bagian tengah, Kerajaan Mataram Kuno sempat dipimpin oleh dua dinasti atau wangsa yakni wangsa Sanjaya dan wangsa Syailendra. Wangsa Sanjaya memerintah kerajaan Mataram Kuno pada tahun 732 M. Prasasti Canggal memberi keterangan bahwa Sanjaya merupakan penerus dari Raja Sanna yang berasal dari Kerajaan Kalingga. Sanjaya memerintah selama 22 tahun, yakni antara tahun 732 M hingga tahun 754 M. Selanjutnya Sanjaya digantikan oleh anaknya yang berasal dari Dewi Sudiwara, yakni Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran kemudian berpindah agama dari penganut Siwa menjadi penganut Buddha (Praptanto, 2010). Bukti bahwa Rakai Panangkaran melakukan konversi agama menjadi seorang penganut Buddha dapat dilihat pada prasasti yang dikeluarkannya, seperti pada prasasti Kalasan tahun 779 M. Sejak peristiwa tersebut terjadi Kerajaan Mataram Kuno diperintah oleh dinasti baru, yakni wangsa Syailendra. Hingga pada akhirnya putri mahkota wangsa Syailendra dinikahi oleh Rakai Pikatan, seorang yang mewarisi keturunan Sanjaya. Rakai Pikatan selanjutnya mendapatkan takhta dari mertuanya. Hal tersebut membuat wangsa Sanjaya kembali ke tampuk kekuasaan.

Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Kerajaan Mataram Kuno silih berganti dikuasai oleh wangsa Sanjaya dan wangsa Syailendra. Salah satunya adalah pendapat dari Slamet Muljana berdasarkan beberapa prasasti seperti prasasti Kayumwungan, prasasti Kelurak, dan prasasti Nalanda. Ketiganya memuat informasi bahwa Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, serta Rakai Garung merupakan bagian dari wangsa Syailendra. Selain itu, raja Mataram Kuno lainnya berasal dari wangsa Sanjaya, seperti Dyah Balitung dan kemudian dilanjutkan oleh Mpu Daksa. Mpu Daksa digantikan oleh Dyah Tulodhong yang merupakan menantunya. Masa pemerintahan Dyah Tulodhong kemudian berakhir karena adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Dyah Wawa. Kekuasaan Dyah Wawa tidak dapat berlangsung lama karena mendapatkan serangan dari Kerajaan Melayu serta adanya peristiwa besar yang disebut *pralaya* (Poesponegoro & Notosusanto, 2019).

Pralaya sendiri merupakan suatu konsep kiamat yang berkembang terutama di wilayah Nusantara. Konsep *pralaya* berasal dari suatu kepercayaan akan hancurnya dunia secara masif pada zaman *kaliyuga*. Konsep *pralaya* terkait erat dengan kepercayaan dalam agama Hindu atas sebuah siklus dalam sejarah yang terus berjalan (Wibowo, 2015). *Pralaya*

dianggap sebagai suatu fase penutup dari sebuah siklus sekaligus fase awal dari adanya siklus baru (kembali ke zaman *kretayuga*) (Moniz, 2015). Peristiwa tersebut merupakan penggambaran dunia yang sudah mengalami ketidakseimbangan. Adanya ketidakseimbangan tersebut mewujudkan menjadi sebuah bencana alam ataupun bencana sosial (Schrieke, 2016).

Terjadinya *pralaya* tampaknya menjadi sebuah poin penting pada sejarah kehidupan dalam masyarakat Jawa. Schrieke (2016) menyatakan, orang Jawa berkeyakinan bahwa setiap dinasti ataupun kerajaan yang berada di Jawa suatu saat pasti akan menghadapi adanya *pralaya* serta kemudian akan memunculkan sebuah dinasti baru yang akan membawa pada kebahagiaan untuk umat manusia. Keberadaan peristiwa *pralaya* tersebut setidaknya akan membawa kepada suatu isu tentang raja yang berkuasa di masa pasca-*pralaya* pada zaman Jawa Kuno. Dasar dari adanya isu tersebut berasal dari sebuah kitab *Agastyaparwa* yang menyatakan bahwa ketika keempat tahapan dalam kehidupan beserta keempat kasta mampu berjalan dengan harmonis, maka dunia dan seluruh umat manusia akan mengalami kebahagiaan. Adanya keadaan yang demikian akan membuat raja beserta keluarga dan seluruh keturunannya terbebas dari penderitaan (Gonda, 1936; Schrieke, 2016).

Adanya *pralaya* yang menimpa Kerajaan Mataram Kuno tersebut juga membuat sebagian pejabat tinggi beserta anggota kerajaan dan juga rakyat mengungsi ke arah timur Jawa. Daerah tersebut kemudian disebut dunia baru, tempat pemujaan baru, pusat pemerintahan baru, serta diperintah oleh adanya wangsa atau dinasti baru pula yakni wangsa Isana (Widiah, 2018). Hal ini sesuai dengan pernyataan Schrieke di atas, yaitu setelah sebuah dinasti atau kerajaan mengalami *pralaya* (Kerajaan Mataram Kuno dalam hal ini) maka akan terjadi perubahan yang memunculkan era baru bagi kerajaan tersebut bersama dengan munculnya dinasti penguasa baru yang membawa harapan akan kebahagiaan setelah adanya *pralaya*.

Dinasti baru tersebut disebut Isana. Istilah wangsa Isana sendiri dapat ditemukan pada prasasti Pucangan yang berbahasa Sanskerta (Poesponegoro & Notosusanto, 2019). Prasasti tersebut dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Airlangga tahun 963 Saka atau 1041 M (Widiah, 2018). Isi dalam prasasti tersebut adalah silsilah dari Airlangga yang dimulai dari Mpu Sindok kemudian mempunyai anak perempuan bernama Sri Isanattungawijaya yang dinikahi oleh Lokapala dan menurunkan Sri Makutawangawardhana. Dilihat dari silsilah pada prasasti Pucangan tersebut maka pendiri wangsa Isana adalah Mpu Sindok. Sebelum menjadi raja, Mpu Sindok mempunyai jabatan sebagai *rakryan mapatih i halu* serta *rakryan mapatih i hino* (Widiah, 2018). Setelah adanya *pralaya* yang menimpa Kerajaan Mataram Kuno yang berpusat di Jawa bagian tengah, Mpu Sindok memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa bagian timur dan mendirikan dinasti baru bernama wangsa Isana.

Masa kekuasaan Mpu Sindok terhitung dari tahun 929 M hingga 948 M (Poesponegoro & Notosusanto, 2019). Pada masa kekuasaannya, berdasarkan artikel Alnoza (2021) didapatkan 23 buah prasasti yang tertulis di batu dan tersebar mulai daerah Jawa bagian tengah hingga Jawa bagian timur. Mayoritas prasasti masa Mpu Sindok berisi mengenai penetapan *sima* untuk sebuah bangunan suci yang diminta oleh rakyat suatu wilayah ataupun seorang pejabat.

Ditemukannya sebanyak 23 prasasti tersebut menjadikan masa pemerintahan Mpu Sindok terekam dengan baik. Hal tersebut memungkinkan analisis mengenai kebijakan apa saja yang sudah dilakukannya selama memerintah berdasarkan prasasti yang ada. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian secara kritis mengenai fungsi Mpu Sindok sebagai suatu unsur dari struktur kekuasaan kerajaan di Pulau Jawa abad ke-10.

Pendekatan analisis fungsional yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan yang diungkapkan oleh Robert King Merton. Sebagai hasil dari pengembangan paradigma fungsionalisme, analisis fungsional Merton ini termasuk sebuah teori fungsionalisme masa modern. Secara empiris pendekatan fungsional Merton dapat digunakan dalam mendapatkan kejelasan dari adanya “keteraturan”. Pendekatan tersebut memungkinkan untuk menilik sejauh mana proses pemenuhan kebutuhan dari setiap unsur yang terdapat di dalam sebuah struktur (Merton, 1968).

Kelebihan dari digunakannya pendekatan analisis fungsional yang berasal dari Merton ini terletak pada terdapatnya sebuah kemungkinan melakukan identifikasi atas suatu bagian yang berasal dari struktur, apakah bagian tersebut memiliki sifat fungsional (fungsi manifes serta fungsi laten) ataupun *disfungsional* (tidak memiliki fungsi sama sekali). Fungsi manifes atau disebut juga dengan *intended function* merupakan fungsi dari sebuah unsur dalam suatu sistem pemerintahan di mana fungsi tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya. Fungsi laten ataupun *unintended function* adalah fungsi dari sebuah unsur dalam sebuah sistem pemerintahan di mana fungsi tersebut tidak berlaku sebagaimana mestinya atau berada di luar adanya rencana yang ditetapkan. *Disfungsional* dalam hal ini memiliki arti terdapatnya suatu unsur tertentu yang tidak dapat berfungsi sama sekali dalam sebuah struktur. Secara praktis analisis fungsionalisme ini dapat digunakan dalam menilai apakah sebuah struktur telah dijalankan sebagaimana fungsinya ataupun tidak, sehingga dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah struktur tersebut sudah mampu memunculkan adanya keseimbangan sistem atau belum (Merton, 1968; Turner & Maryanski, 2010). Digunakannya analisis fungsionalisme dari Merton dalam penelitian ini dikarenakan pendekatan fungsionalisme dari Merton dapat menyediakan sebuah pandangan tentang berfungsi atau tidaknya kebijakan Mpu Sindok dalam struktur kerajaannya.

Berdasarkan adanya pembahasan mengenai pendekatan analisis fungsional dari Merton, penulis memiliki hipotesis bahwa seharusnya Mpu Sindok telah mampu dalam memenuhi fungsi sebagai seorang raja dalam struktur kerajaannya. Oleh karena itu, adanya penelitian ini adalah sebuah upaya dari penulis dalam membuktikan adanya hipotesis tersebut. Mengenai rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana Mpu Sindok dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang raja berdasarkan pandangan fungsionalisme Merton? Rumusan masalah tersebut kemudian dijawab supaya dapat memenuhi tujuan penelitian ini, yakni mencari informasi tentang adanya fungsi manifes, fungsi laten, serta *disfungsional* pada masa kekuasaan Mpu Sindok dalam struktur kerajaannya berdasarkan kebijakan yang dikeluarkannya.

Metode sejarah digunakan pada penelitian ini, metode tersebut terdiri dari tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Ismaun, 2005). Tahap pertama yakni heuristik atau disebut tahap pengumpulan sumber data. Sumber data didapat melalui studi pustaka dengan referensi dari buku serta jurnal (Setyosari, 2016). Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji buku, artikel jurnal, beserta dokumen baik dalam bentuk elektronik maupun cetak yang dianggap sesuai dengan topik penelitian (Nazir, 1988). Tahap kedua yakni melakukan verifikasi atau kritik sumber yang terdiri dari dua macam kritik, yakni kritik internal untuk menguji kerelevanan data serta kritik eksternal untuk menguji keaslian data. Tahap ketiga yakni interpretasi. Kuntowijoyo (1994) menyatakan bahwa tahap interpretasi merupakan cara dalam menafsirkan data beserta sumber yang didapatkan, kemudian diolah menjadi sebuah peristiwa sejarah yang bisa dipahami. Tahap terakhir yakni historiografi, yakni penggabungan data hasil interpretasi beserta sumber yang didapat menjadi sebuah karya tulis sejarah.

Selain itu, juga digunakan analisis berdasarkan kerangka berpikir fungsionalisme (Merton, 1968; Turner & Maryanski, 2010). Merton menyatakan bahwa dalam mengidentifikasi sebuah fungsi dari tiap bagian struktur, diperlukan deskripsi secara empiris terlebih dahulu mengenai bentuk struktur yang menaunginya. Kemudian, penulis mengkaji tentang parameter pemenuhan kebutuhan bagi struktur dari setiap bagian struktur yang lain secara keseluruhan. Pada bagian akhir, penulis melakukan analisis untuk mencari adanya konsekuensi fungsional atau *disfungsional* dari setiap bagian struktur. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Mpu Sindok adalah bagian dari sebuah struktur. Karena itu, dilakukan analisis untuk mendapatkan deskripsi tentang bentuk struktur sebuah kerajaan yang diperintah Mpu Sindok serta kebijakan yang dibuatnya.

Mengenai parameter yang digunakan penulis untuk mengukur pemenuhan kebutuhan struktur dari keberadaan Mpu Sindok sebagai raja adalah dengan menggunakan pedoman raja ideal yang terdapat pada budaya Jawa, yakni uraian tentang *astabrata*, terdapat pada Kakawin Ramayana. Kemudian, kedua data tersebut dibandingkan satu dengan yang lain. Perbandingan ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan tentang aspek mana saja yang fungsional atau *disfungsional* dari pemerintahan Mpu Sindok.

II. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintahan Mpu Sindok

Mpu Sindok berkuasa dari tahun 929 M hingga tahun 948 M. Selain kebijakan dalam memindahkan ibukota kerajaan, Mpu Sindok juga mengeluarkan banyak prasasti. Pada saat dilakukannya penelitian ini, sebanyak 23 buah prasasti masa Mpu Sindok berhasil dihimpun untuk dijadikan data. Prasasti tersebut tersebar di sekitar aliran Sungai Brantas dan Gunung Penanggungan. Prasasti pada masa Mpu Sindok kebanyakan membahas mengenai penetapan *sima* atas sebuah daerah. *Sima* sendiri dapat diartikan sebagai sebuah daerah otonom yang terbebas dari kewajiban dalam membayar pajak (Haryono, 1999). Berikut adalah prasasti-prasasti yang dijadikan data penelitian.

- 1) Prasasti Cunggurang I & II yang berisi penetapan Desa Cunggurang sebagai *sima* yang dipergunakan bagi adanya bangunan suci untuk menghormati mertua Mpu Sindok, yakni Rakryan Bawang yang didewakan di *pawitra* (Damais, 1955; Poesponegoro & Notosusanto, 2019);
- 2) Prasasti Linggasutan berisi mengenai penetapan Desa Linggasutan yang berada dalam wilayah Rakryan Hujung menjadi suatu daerah *sima* untuk pembuatan sebuah bangunan suci yang ditunjukkan untuk *Bhatara i Walandit* (Poesponegoro & Notosusanto, 2019; Wurjantoro, 2018);
- 3) Prasasti Poh Rinting memuat penetapan *sima* dikarenakan permohonan pejabat lokal karena daerah Poh Rinting terdapat bangunan suci berupa *kebikuan* (Damais, 1955; Susanti, 2010);
- 4) Prasasti Sarangan memuat penetapan Desa Sarangan menjadi wilayah *sima* (Wurjantoro, 2018);
- 5) Prasasti Turryan berisi penetapan sebidang tanah yang berada di Turryan untuk pembuatan bangunan suci dan perintah kerja bakti bagi penduduk desa untuk membangun bendungan (Poesponegoro & Notosusanto, 2019);
- 6) Prasasti Gulung-gulung di dalamnya memuat informasi tentang penetapan wilayah hutan yang terletak di Bantaran sebagai wilayah *sima* untuk digunakan sebagai sebuah tempat dilakukannya persembahan untuk *Sang hyang i pangawan* (Pardede, 1986; Wurjantoro, 2018);
- 7) Prasasti Waharu II berisi peresmian wilayah *dharmma sima* pada tanah yang dimiliki oleh Rakryan Mahamantri Pu Sahasra, adanya anugerah dari raja tersebut berlaku hingga anak turunnya (Pardede, 1986);
- 8) Prasasti Jru-jru memuat informasi penetapan Desa Jru-jru menjadi tanah *sima* untuk sebuah bangunan suci yang ditujukan bagi Rakryan Hujung untuk pemujaan kepada *Sang Sala* (Poesponegoro & Notosusanto, 2019; Wurjantoro, 2018);
- 9) Prasasti Waharu IV berisikan penetapan daerah Desa Waharu menjadi *sima* karena kesetiaan rakyat kepada Mpu Sindok (Susanti, 2010);
- 10) Prasasti Sumbut memuat informasi tentang peresmian *sima* Desa Sumbut karena jasa rakyat Sumbut dalam membantu raja untuk menghalau musuh (Poesponegoro & Notosusanto, 2019);
- 11) Prasasti Geweg berisi penetapan Desa Geweg menjadi wilayah *sima* oleh permaisuri Mpu Sindok (Brandes, 1913; Poesponegoro & Notosusanto, 2019);
- 12) Prasasti Hering berisi penetapan Desa Hering sebagai *sima* oleh raja melalui Rakai Kanuruhan Pu Ta. Penetapan *sima* tersebut adalah untuk pemeliharaan Wihara (Pardede, 1986);
- 13) Prasasti Kanuruhan memuat informasi mengenai peresmian adanya sebidang tanah yang termasuk dalam daerah Kanuruhan menjadi *sima* dan diperuntukkan bagi kebun bunga nantinya (Susanti, 2010);

- 14) Prasasti Wulig berisi tentang perintah dari istri Mpu Sindok yakni Rakryan Binihaji Rakryan Mangibil terhadap penduduk Desa Wulig untuk membangun sebuah bendungan (Damais, 1955; Poesponegoro & Notosusanto, 2019);
- 15) Prasasti Anjukladang memiliki isi tentang penetapan sawah *kaktikan* sebagai *sima* untuk bangunan suci yang digunakan untuk menyembah *Sang hyang Prasada Kabaktyan i Sri Jayamerta*. Selain itu, juga terdapat informasi mengenai kemenangan Mpu Sindok atas musuh dari Melayu (Damais, 1955; Poesponegoro & Notosusanto, 2019; Wurjantoro, 2018);
- 16) Prasasti Sobhamerta memuat informasi mengenai penetapan *sima* atas sebidang tanah Desa Sobhamerta untuk pemeliharaan wihara (Susanti, 2010);
- 17) Prasasti Alasantan berisi peresmian Desa Alasantan menjadi *sima* yang ditujukan kepada ibunda Rakryan Mapatih i Halu Dyah Sahasra (Pardede, 1986).
- 18) Prasasti Kamban memuat tentang penetapan Desa Kamban sebagai wilayah *sima* oleh Mpu Sindok dengan perantara Rakryan Kanuruhan (Damais, 1955);
- 19) Prasasti Paradah I mengenai penetapan *sima* di Desa Paradah untuk bangunan suci berupa *kabikuan* (Damais, 1955; Poesponegoro & Notosusanto, 2019);
- 20) Prasasti Paradah II berisi tentang pembelian sawah di Desa Paradah untuk dijadikan *sima* sebagai persembahan kepada *Sang Hyang Dharmma Kamulan* (Poesponegoro & Notosusanto, 2019);
- 21) Prasasti Muncang berisi tentang penetapan *sima* atas sebidang tanah yang berada di selatan Pasar Muncang, *sima* tersebut ditetapkan untuk sebuah bangunan suci *siddhayoga* (Pardede, 1986; Poesponegoro & Notosusanto, 2019);
- 22) Prasasti Wurandungan I memuat informasi bahwa seluruh wilayah Kanuruhan ditetapkan sebagai *sima* untuk bangunan suci yang berfungsi sebagai persembahan kepada *Sang Hyang Dharmma Kahyangan i Wurandungan* (Damais, 1955).

Berdasarkan daftar di atas, terdapat keunikan pada kebijakan yang dilaksanakan oleh Mpu Sindok, yakni mengenai seringnya pemberian *sima punpunan*, yaitu penetapan *sima* yang untuk sebuah bangunan suci keagamaan (Darmosoetopo, 1997). Kemudian terdapat sebuah kebijakan yang bersifat sosial yaitu pemberian *sima makudur*, yakni penetapan *sima* yang diberikan raja terhadap orang yang memiliki jasa untuk sang raja (Darmosoetopo, 1997). Selain itu, terdapat penetapan *sima* yang digunakan sebagai pemeliharaan suatu fasilitas, pembangunan bendungan, dan pembuatan kebun bunga. Kebijakan penetapan *sima* yang dikeluarkan oleh Mpu Sindok atas sebuah wilayah kebanyakan berdasarkan permintaan dari rakyat atau pejabat suatu wilayah itu sendiri. Penetapan daerah sebagai *sima* yang berdasarkan perintah Mpu Sindok sendiri hanya terdapat pada prasasti Linggasutan mengenai status *sima* Desa Linggasutan dan penetapan sawah *kaktikan* pada prasasti Anjukladang (Poesponegoro & Notosusanto, 2019).

B. Aspek dalam Konsep *Astabrata*

Astabrata berasal dari dua suku kata dalam bahasa Jawa Kuno, yaitu *asta* (delapan) dan *brata* (laku). Dengan demikian, secara bahasa *astabrata* berarti “delapan lelaku”. Konsep tersebut pada mulanya adalah penggalan kutipan dari *Kakawin Ramayana* yang berkembang pada sekitar abad ke-9 Masehi. Kutipan dalam *Kakawin Ramayana* tersebut mengisahkan cerita Sri Rama yang telah berhasil dalam mengalahkan raja Alengka, yakni Rahwana. Kemudian Rama mengangkat Wibisana, adik Rahwana, untuk menjadi raja baru di Alengka. Mendapatkan perintah dari Rama tersebut Wibisana merasa ragu, sehingga Sri Rama menasihati Wibisana dengan delapan lelaku yang harus dilaksanakan oleh seorang raja yang ideal. Delapan lelaku tersebut adalah dengan meneladani sifat dewa yang mendiami delapan mata angin (*hastadikpalaka*), di mana kedelapan sifat dewa tersebut harus terdapat dalam diri seorang raja.

Kedelapan dewa tersebut beserta sifatnya adalah Dewa Agni bersifat membinasakan bagi musuh layaknya api; Dewa Varuna bersifat tegas dalam menegakkan hukum layaknya senjata Varuna berupa jerat Nagapasa; Dewa Vayu bersifat lembut dalam perbuatan maupun dalam mengamati suatu perbuatan, serta memiliki wawasan yang luas tanpa terlihat mencolok; Dewa Candra bersifat menggembirakan bagi seluruh dunia, tingkah laku lemah lembut, manis dalam bertutur, dan menghormati orang tua dan seluruh pendeta; Dewa Indra bersifat menentramkan dengan menurunkan hujan sebagai hadiah yang membanjiri dunia; Dewa Kuvera bersifat mewah, elegan, dan berwibawa dengan berdandan dan bersolek untuk menjadi simbol kejayaan; Dewa Surya bersifat hati-hati dalam bertindak layaknya matahari menguapkan air dengan perlahan; dan Dewa Yama bersifat memberantas semua rintangan dan keras dalam menghukum penjahat (Munandar, 2017).

C. Analisis Fungsional pada Pemerintahan Mpu Sindok

Aspek dalam *astabrata* yang mengatakan bahwa raja haruslah dermawan dengan mampu memberi hadiah melimpah kepada rakyatnya terpenuhi. Penerapannya adalah melalui sebuah kebijakan penetapan *sima makudur* kepada rakyatnya. Melalui adanya kebijakan tersebut berarti Mpu Sindok telah memberikan hak istimewa bagi suatu daerah untuk bebas dari membayar pajak kepada negara. Kebijakan pemberian *sima makudur* dapat diklasifikasikan sebagai fungsi manifes dari Mpu Sindok dengan meneladani Dewa Indra dalam *astabrata*.

Fungsi manifes bagi Mpu Sindok juga terpenuhi dengan berhasilnya Mpu Sindok dalam menghalau musuh. Keganasan Mpu Sindok terbukti dari peristiwa pada prasasti Anjukladang, yaitu Mpu Sindok berhasil menghukum dengan mengalahkan musuh yang berasal dari Melayu. Hal tersebut sesuai dengan aspek yang terdapat dalam *astabrata*. Kebijakan lain seperti pemenuhan permintaan *sima* dari rakyat ataupun pejabat daerah juga merupakan bukti pemenuhan aspek *astabrata* bahwa dalam kasus ini raja mempunyai wawasan yang luas akan wilayah kerajaannya sehingga dapat mengetahui permintaan rakyatnya. Wawasan luas atas wilayah kerajaan tersebut sesuai dengan aspek dalam *astabrata* yakni meneladani Dewa Vayu yang memiliki wawasan luas atas dunia.

Aspek lain dalam *astabrata* yakni meneladani Dewa Candra dengan melakukan penghormatan kepada yang lebih tua atau kepada pendeta. Aspek tersebut terpenuhi dan dibuktikan dalam prasasti Cungggrang, yaitu Mpu Sindok menetapkan *sima* untuk bangunan suci yang dipersembahkan untuk menghormati mertuanya yang bernama Rakryan Bawang dan pada prasasti Alasantan, yaitu terdapat penetapan *sima* yang ditujukan kepada ibunda Rakryan Mapatih i Halu Dyah Sahasra (Pardede, 1986). Selain itu, Mpu Sindok juga banyak menetapkan pemberian *sima punpunan* baik dalam bentuk pembangunan bangunan suci atau pemeliharaan fasilitas keagamaan seperti yang ditunjukkan dalam prasasti Hering dan prasasti Sobhamerta. Berdasarkan bukti tersebut Mpu Sindok berhasil menjalankan fungsi manifestasinya dalam menghormati orang tua dan para pendeta sesuai dengan aspek dalam *astabrata* dengan meneladani Dewa Candra.

Fungsi laten pada pemerintahan Mpu Sindok yang dapat diidentifikasi adalah mengenai pemindahan pusat pemerintahan dari daerah Jawa bagian tengah ke daerah Jawa bagian timur. Aspek tersebut tidak terdapat dalam pemenuhan aspek *astabrata*. Mpu Sindok menjalankan fungsi latennya tersebut dikarenakan adanya *pralaya* yang menimpa Kerajaan Mataram Kuno, *pralaya* tersebut berupa adanya peristiwa vulkanik yakni meletusnya Gunung Merapi (Poesponegoro & Notosusanto, 2019). Kemudian setelah itu Mpu Sindok memindahkan lagi ibu kota dari sebelumnya berada di Tamwlang menurut prasasti Turryan berpindah ke Watugaluh sebagaimana tertulis dalam prasasti Paradah.

Fungsi laten lainnya adalah terdapatnya aspek demokrasi di mana hal tersebut memungkinkan rakyat ataupun pejabat yang berkedudukan di bawah raja untuk mengajukan permohonan terhadap raja. Poesponegoro & Notosusanto (2019) menjelaskan bahwa kebanyakan penetapan *sima* dalam prasasti Mpu Sindok karena adanya permintaan dari rakyat atau pejabat supaya mendapatkan anugerah berupa penetapan *sima* itu sendiri. Adanya aspek demokrasi tersebut tidak terdapat dalam pedoman *astabrata*. Aspek demokrasi pada masa pemerintahan Mpu Sindok dapat muncul justru karena adanya pemenuhan fungsi manifestasi bahwa raja harus memberikan hadiah layaknya Dewa Indra dalam pedoman *astabrata*.

Kebijakan masa Mpu Sindok yang memerlukan kajian lebih mendalam adalah pada pemenuhan aspek *astabrata* yakni bertindak secara hati-hati atau perlahan meneladani sifat Dewa Surya. Hasil analisis mengenai proses pelaksanaan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan dan pembentukan dinasti baru, yakni wangsa Isana memunculkan hipotesis bahwa proses tersebut dilakukan perlahan dan hati-hati supaya tidak menimbulkan pemberontakan dari wilayah bawahan Mpu Sindok. Namun, terdapat indikasi adanya peperangan melawan raja bawahan yang tidak bersedia tunduk serta perlu ditaklukkan dengan peperangan. Hal tersebut bukanlah hal yang mustahil terjadi. Prasasti Waharu dan Sumbut secara samar membayangkan adanya peristiwa semacam itu (Poesponegoro & Notosusanto, 2019). Dari sini belum dapat disimpulkan dengan jelas apakah pelaksanaan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan dan pembentukan dinasti baru tersebut termasuk fungsi manifestasi Mpu Sindok pada pemenuhan aspek *astabrata*, yakni meneladani sifat Dewa Surya atau malah menjadi *disfungsi* dalam masa pemerintahannya. Selain itu, mengenai aspek

bahwa raja harus tampil elegan dan menjadi simbol kejayaan dalam *astabrata* juga kurang dapat diidentifikasi apakah Mpu Sindok menjalankan fungsi manifestnya atau *disfungsi*. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi dalam prasasti mengenai sisi kemewahan sang raja.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kebijakan-kebijakan masa pemerintahan Mpu Sindok, dapat disimpulkan bahwa selama masa pemerintahannya, Mpu Sindok dapat melaksanakan fungsi manifest dan fungsi laten pada sebagian aspek serta bersifat samar antara fungsional atau *disfungsional* dalam aspek yang lain. Fungsi manifest Mpu Sindok terlihat dari kebijakannya di bidang infrastruktur, sedangkan fungsi latennya terdapat di bidang sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dinyatakan bahwa Mpu Sindok adalah seorang raja pembangun infrastruktur.

Hal ini tercermin melalui banyaknya kebijakan pemberian *sima punpunan* kepada rakyatnya baik yang memohon penetapan *sima* tersebut ataupun Mpu Sindok sendiri yang menetapkannya. Hasil dari analisis fungsional ini juga menunjukkan bahwa Mpu Sindok sebagai penguasa Kerajaan Mataram Kuno belum mencapai tahap sempurna sebagai raja ideal sesuai dengan yang terdapat dalam *astabrata*. Meskipun demikian, penelitian ini juga tidak dapat memastikan bahwa Mpu Sindok bukan raja yang ideal.

Pada dasarnya penelitian ini bergantung terhadap ketersediaan data sejarah yang saat ini belum lengkap, hal tersebut yang menyebabkan analisa mengenai kebijakan-kebijakan Mpu Sindok belum dapat dijabarkan secara lengkap. Semakin bertambahnya temuan prasasti terbaru atau adanya manuskrip pendukung tentu dapat mengubah penafsiran tentang kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Mpu Sindok selama masa pemerintahannya.

B. Saran

Hasil penelitian ini masih bersifat sementara karena hanya berdasar pada data yang tersedia saat ini mengenai kebijakan pemerintahan Mpu Sindok. Dengan demikian, tentu masih diperlukan adanya penelitian lebih lanjut di masa mendatang dengan sumber yang lebih memadai sehingga dapat diperoleh tafsiran yang lebih lengkap mengenai kebijakan masa pemerintahan Mpu Sindok.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnoza, M. (2021). Arah Kebijakan Raja pada Masa Jawa Kuno Pasca Peristiwa Pralaya dari Sudut Pandang Teori Kontrak Sosial. *Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat*, 223–233. <https://doi.org/10.24164/prosiding.v4i1.21>
- Brandes, J. L. A. (1913). *Oud-Javaansche Oorkonden: Negalaten Transcripties*. Albrecht & Co.
- Damais, L.C. (1955). II. Etudes d'épigraphie indonésienne : IV. Discussion de la date des inscriptions. *Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient*, 47(1), 7–290. <https://doi.org/10.3406/befeo.1955.5406>
- Darmosoetopo, R. (1997). *Hubungan Tanah Sima dengan Bangunan Keagamaan di Jawa pada Abad IX-X M*. Universitas Gadjah Mada.
- Gonda, J. (1936). Agastyaparwa. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde van Nederlanche Indie*, 223–285.
- Haryono, T. (1999). Sang Hyang Watu Teas dan Sang Hyang Kulumpang: Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima pada Masa Kerajaan Mataram Kuna. *Humaniora*, 11(3), 14–21.
- Ismaun. (2005). *Pengantar Belajar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. Historia Utama Press.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.
- Moniz, A. (2015). The End of Days: Tales of Apocalypse Across Time and Space. *Hohonu*, 13, 38–42.
- Munandar, A. A. (2017). Tradisi Pemerintahan dan Konsep Raja Ideal Menurut Pandangan Masyarakat Sunda Kuna Abad Ke-13-16 M. In *Siliwangi, Sejarah dan Kebudayaan Sunda Kun*. Wedatama Widyastra.
- Nazir, Moh. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pardede, R. D. S. (1986). Klasifikasi Sima: Sebuah Kajian Data Ukuran Tanah dari isi Prasasti-prasasti Masa Sindok sampai dengan Airlangga. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II: Zaman Kuno*. Balai Pustaka.
- Praptanto, E. (2010). *Sejarah Indonesia Zaman Kerajaan Kuno*. PT Bina Sumber Daya Mipa.
- Schrieke, B. J. O. (2016). *Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia: Penguasa dan Kerajaan Jawa pada Masa Awal*. Penerbit Ombak.
- Setyosari, P. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*. Prenada Media.
- Susanti, N. (2010). *Airlangga: Biografi Raja Pembaharu Jawa Abad XI*. Komunitas Bambu.

- Turner, J. H., & Maryanski, A. (2010). *Fungsionalisme*. Pustaka Pelajar.
- Wibowo, A. S. (2015). Ratu Adil Jawa dan Ratu Filsaf Platon: Timbangan dan Aktualisasinya untuk Saat Ini. In D. R. Herliany, I. Muhtarom, S. J. Suyono, W. Adi, & Y. Darmawan (Eds.), *Ratu Adil, Kuasa, dan Pemberontakan di Nusantara* (pp. 14–43). Penerbit Ombak.
- Widiah, S. (2018). Studi Historis Prasasti Cungggrang sebagai Sumber Sejarah pada masa Mpu Sindok Tahun 929-947 M. *Avatara*, 6(1), 221–237. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/22843>
- Wurjantoro, E. (2018). *Anugerah Sri Maharaja: Kumpulan Alihaksara dan alihbahasa Prasasti-prasasti Jawa Kuno dari Abad VII-XI*. Departemen Arkeologi FIB UI.